

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kelompok Muslim telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan dinamika pembangunan di Papua. Muslim dalam sejarahnya hadir di tengah dominasi Kristen. Bahkan, Kristen dianggap sebagai kelompok dominan khususnya secara politis menjadi kekuatan utama dalam membangun Papua. Kehadiran Muslim dengan berbagai prosesnya, tidak hanya dilihat sebagai penanda hadirnya kultur agama yang berbeda, tetapi juga merupakan indikasi bahwa kebersamaan agama-agama menjadi mutlak di Papua. Baik Muslim maupun Kristen telah berkontribusi bagi lahirnya kondisi kehidupan sosial politik di Papua yang bersifat fluktuatif dengan segala macam persoalan yang melingkupinya.

Hal di atas melahirkan penguatan identitas baik individu maupun kelompok di satu sisi di mana identitas tidak hanya menjadi sebuah tanda, tetapi juga merupakan bentuk upaya kelompok atau individu untuk menunjukkan eksistensinya di tengah keberadaan identitas yang lain. Di sisi lain, isu identitas khususnya agama selalu menarik karena tidak terbatas pada keberadaan kelompok atau individu tertentu. Jauh dari itu, identitas juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik (Rumahuru, 2012:1). Penguatan identitas individu atau kelompok yang terjadi secara berlebihan berdampak pada terjadinya apa yang disebut fanatisme atau kebanggaan (yang berlebihan) terhadap apa yang melekat pada diri atau kelompoknya dan cenderung menafikan keberadaan dan peran kelompok lain yang memiliki identitas yang berbeda.

Dalam konteks Papua, kehadiran Muslim tidak hanya sekedar kehadiran sebuah kelompok yang dianggap “baru”, tetapi juga menyangkut persaingan antara kelompok agama untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Muslim Papua yang telah eksis dan menetap sejak lama menandai persaingan sengit di kalangan kelompok agama khususnya antara Islam dan Kristen dalam berbagai ruang dan kesempatan, dalam terminologi lain disebut telah terjadi “balapan” agama (Azra, 2003) yang melibatkan dua agama langit yang terus berjalan beriringan. Hal ini terjadi, salah satunya, karena selama

ini selalu muncul klaim menyangkut kepemilikan tanah Papua selama ini yang diklaim oleh salah satu kelompok (agama).

Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa antara Islam dan Kristen memiliki akar sejarah yang cukup kuat di Papua yang ditandai oleh peninggalan artefak-artefak yang menunjukkan penyebaran kedua agama di tanah Papua. Bahkan, agama dianggap sebagai agama memegang peranan yang cukup penting dalam konflik di Papua. Konflik yang terjadi tidak tepat apabila hanya dianggap sebagai diinterpretasikan sebagai masalah politis, etnis atau lingkungan saja (Warta, 2011:73). Artinya, agama juga berperan dengan yang lainnya melahirkan konflik di Papua.

Konflik yang terjadi tidak hanya menyangkut perebutan 'massa' atau pengikut, tetapi juga berhubungan dengan klaim kepemilikan atas Papua. Hal tersebut kemudian memunculkan beragam respons khususnya dari kedua kelompok agama (Islam dan Kristen) mengenai siapa yang paling awal mendiami tanah Papua. Studi Idrus Al Hamid (2013) menunjukkan bahwa antara Islam dan Kristen 'berebut' kepemilikan terhadap Papua. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai bentuk kontestasi di antara keduanya. Misalnya, banyaknya simbol keagamaan yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok agama khususnya di kalangan Kristen. Keberadaan simbol-simbol agama tersebut dapat dipahami sebagai sebuah bentuk keinginan untuk menonjolkan diri di hadapan kelompok agama lain yang juga memiliki keinginan yang hampir sama (Jubba, 2019).

Muslim Papua saat ini memiliki sebuah wadah yang cukup strategis di Papua, yaitu Majelis Muslim Papua (MMP) dan tersebar di seluruh wilayah Papua, termasuk di Kota Jayapura dengan berbagai aktivitas sosial keagamaan yang intensif dilakukan. MMP menjadi wadah Muslim untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang mengedepankan pembinaan umat (internal) dan hubungan dengan pemeluk agama lain (eksternal). Wadah ini kemudian berevolusi baik dari jumlah anggota maupun intensitas pertemuan yang berwujud dalam bentuk ceramah agama, diskusi, dan pagelaran aktivitas-aktivitas yang melibatkan publik Muslim. Kegiatan-kegiatan keagamaan bahkan dilakukan secara terbuka dan diselenggarakan di tempat-tempat umum seperti kongres MMP dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Keberadaan dan kiprah Muslim Papua pun kemudian menjadi terorganisir dan terkendali sehingga mampu

berkontribusi bagi lahirnya pola hubungan yang dinamis khususnya dengan pemerintah dan masyarakat luas di Kota Jayapura.

Pada isu lain, birokrasi pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota pendistribusian jabatan strategis berjalan tidak seimbang. Mayoritas posisi atau jabatan penting di birokrasi diduduki oleh orang Papua yang non-Muslim. Pada setiap kabupaten kota, seluruhnya dipimpin oleh kalangan non-Muslim. Di kota Jayapura sendiri, meskipun wakil walikota berasal dari kalangan Muslim, namun perannya sangat terbatas bahkan dibatasi. Dominasi jabatan yang hingga kini berlangsung memberikan ruang yang sangat terbatas bagi kelompok Muslim. Kelompok Muslim pun melakukan berbagai upaya untuk selain menunjukkan keberadaannya, juga untuk mendukung masa depannya di Papua.

Pada sektor ekonomi, justru terjadi sebaliknya di mana mayoritas sentra ekonomi dikuasai oleh mayoritas Muslim. Penguasaan sentra-sentra ekonomi oleh Muslim ini pun menimbulkan beragam anggapan di kalangan masyarakat Papua. Bahkan ada yang hingga mengklaim bahwa hal tersebut sebagai bentuk atau upaya islamisasi Papua karena hampir seluruh kebutuhan masyarakat Papua di Jayapura dikendalikan oleh Muslim yang notabene mayoritas pendatang. Persoalan ini kemudian menimbulkan konsepsi baru dengan lahirnya tipologi masyarakat: pendatang (Muslim) vs pribumi (Kristen) yang hingga kini masih menyimpan potensi ketegangan yang relatif mampu mengubah konstelasi dan hubungan kedua kelompok agama. Tipologi masyarakat seperti ini tidak lepas dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah kala itu yang kebetulan mayoritas penduduk yang ikut bertransmigrasi ke Papua adalah Muslim. Dari sinilah kemudian, Muslim dianggap sebagai kelompok yang berupaya “merampas” bahkan melakukan islamisasi terhadap tanah/orang Papua yang ditandai oleh munculnya berbagai organisasi, paguyuban, dan kelompok sosial lainnya yang menyatakan diri sebagai kelompok Muslim di Papua.

Pada kasus Majelis Muslim Papua, persoalan yang sering muncul dan dikaitkan dengan keberadaan dan kiprahnya saat ini adalah keinginan kelompok-kelompok agama untuk menunjukkan pengaruh di tengah otonomi khusus yang diberikan kepada Papua. Agama telah menjadi faktor yang membawa perubahan terhadap hubungan sosial politik di Papua khususnya Jayapura. MMP

merupakan organisasi pemersatu kalangan Muslim sekaligus wadah perjuangan dalam memperjuangkan Islam secara keseluruhan di Papua. Pada awalnya, memang MMP dibentuk dalam rangka menjadi wadah umat Islam di Papua, artinya bukan hanya Muslim Papua (Orang Papua Asli yang beragama Islam). MMP selama ini memerankan peran yang cukup penting dalam mewedahi kepentingan Muslim, meskipun masih terbatas pada kepentingan internal seperti melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan persoalan keumatan di Papua.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Keberadaan Muslim di Papua khususnya di Kota Jayapura, sebagaimana telah disinggung di atas, telah berkontribusi terhadap lahirnya pola hubungan yang dinamis dan terbuka di antara kelompok agama. Kelompok-kelompok agama hidup berdampingan dengan peran masing-masing. Kehadiran Muslim dan Kristen serta agama-agama lain telah menjadikan Jayapura sebagai daerah yang sangat kaya atas perbedaan. Keragaman di Jayapura pun menjadi fakta yang tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena sosial yang alamiah, karena kehadiran Muslim akhir-akhir ini turut mempengaruhi perubahan relasi sosial ekonomi dan politik di Jayapura Papua. Bahkan, keberadaan Muslim sering pula dianggap sebagai pesaing Kristen di Papua.<sup>1</sup> Artinya, keberadaan Muslim dianggap sebagai salah satu faktor “pemicu” ketidak-harmonisan hubungan sosial atau lahirnya konflik di Jayapura Papua.

Terbentuknya MMP sebagai wadah umat Islam di Papua, khususnya di Jayapura, banyak pihak menganggapnya sebagai cara untuk melakukan ‘koreksi’ atas kebijakan-kebijakan politik di Papua selama ini. Organisasi yang berafiliasi dengan agama Kristen tumbuh dan berkembang di Papua. Bahkan, organisasi tersebut mendapat dukungan yang sangat besar dari pemerintah daerah, khususnya menyangkut pendanaan dan fasilitas keagamaan serta kemudahan melakukan berbagai kegiatan. Kenyataan tersebut juga menjadi

---

<sup>1</sup>Hal ini dapat dilihat pada studi yang dilakukan oleh Idrus Al Hamid (2014) ketika melihat Transformasi Agama dan Budaya di Jayapura. Muslim dengan status ‘pendatang’ terus mengalami perkembangan (kuantitas) secara signifikan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk asli Papua.

perhatian umat Islam kemudian membentuk wadah MMP sebagai media komunikasi di internal umat agar solidaritas dapat terbangun dengan baik, termasuk keterpenuhan penceramah, guru mengaji, guru agama, dan lainnya. Akan tetapi, MMP dalam perkembangannya hingga saat ini, mengalami pergeseran peran.

Pada awalnya, MMP dibentuk sebagai wadah yang murni untuk kepentingan pengembangan umat, namun saat ini MMP juga sering dilibatkan dalam berbagai kepentingan, termasuk politik di level lokal. Pada setiap perhelatan pilkada atau pemilukada, MMP menjadi salah satu kekuatan penting yang menjadi tujuan para calon. MMP pun memerankan peran yang tidak bisa lepas dari politik seperti penguatan internal dalam rangka menaikkan posisi tawar di Papua khususnya setelah pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua. MMP bukan hanya terbatas pada sebuah wadah yang menghimpun identitas kolektif Muslim Papua, tetapi telah menjadi arena perebutan pengaruh dan memiliki posisi yang strategis. Mengacu pada kondisi ini, persoalan yang dikaji dalam disertasi ini adalah: **bagaimana kiprah MMP dalam membentuk identitas Muslim Papua di era otonomi khusus?**

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Peneliti**

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, memberikan penjelasan mengenai upaya MMP membentuk identitas di tengah dinamisasi hubungan social (agama) yang sangat dinamis di Jayapura. Sebab, keberadaan Muslim di Kota Jayapura dengan segala persoalan yang dihadapi selama ini. Muslim Papua selama ini sering diposisikan dan dianggap sebagai kelompok yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan yang damai khususnya di Kota Jayapura. Aktivitas-aktivitas sosial keagamaan sering dinilai sebagai upaya propaganda bahkan provokasi kalangan Muslim di Papua. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh mengenai relasi dan ketegangan kehidupan kedua kelompok agama secara mendalam. *Kedua*, melihat dampak atas keberadaan MMP pasca otonomi khusus Papua. Hal ini penting dilakukan untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana Muslim dikonstruksikan atau bahkan dipersepsikan terkait dengan keberadaan wadah MMP ini. *Ketiga*, disertasi ini juga bertujuan untuk menganalisis pergeseran

peran MMP serta masa depan MMP di Papua dengan berbagai dinamikanya.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain, *pertama*, secara akademis-teoretis penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan mengenai kajian sosial-keagamaan dalam kaitannya dengan posisi kelompok agama di tengah kelompok agama lain dan kekuasaan (politik) yang memiliki identitas kuat dan pengaruh yang cukup terbuka. Kajian seperti ini akan menambah wawasan keilmuan khususnya di kalangan akademisi dan pemerhati kajian agama dan politik terutama mengenai kajian yang berusaha mengkaji persoalan sosial keagamaan (kelembagaan) di tengah masyarakat yang plural. Kajian akademik yang selama ini masih sangat minim sehingga persepsi mengenai orang Papua khususnya Muslim, termasuk organisasinya, kurang ditemukan dan kurang memberikan informasi serta penjelasan yang luas.

*Kedua*, secara praktis-aplikatif disertasi ini dapat menjadi pilihan dan rujukan dalam pengambilan keputusan khususnya menyangkut membangun relasi antara kelompok yang berbeda, khususnya agama, dalam ranah yang semakin terbuka dalam rangka menghindari konflik. Pilihan kajian akademik seperti ini akan memperkaya desain sebuah kebijakan sehingga implementasinya pun akan tetap guna. Selama ini, banyak regulasi atau kebijakan yang dirancang tidak *based on research* sehingga kurang menyentuh akan persoalan. Dengan demikian, kajian ini memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya pada pengembangan pengetahuan secara umum, tetapi juga dapat menjadi pilihan rujukan dalam perumusan berbagai kebijakan terkait dalam menata Papua secara umum di masa mendatang.

#### **1.4. Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah yang telah diterbitkan berjudul THE CONSTRUCTION OF MUSLIM IDENTITY POST SPECIAL AUTONOMY: The Study of Majelis Muslim Papua Existence. Artikel jurnal tersebut diterbitkan oleh Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Volume 13 Nomor 2 Desember 2018. Jurnal Episteme adalah jurnal nasional terakreditasi (SINTA 2). Artikel jurnal dipublikasikan Bersama Tim Pembimbing yang terdiri dari Dr.

Surwandono (Promotor), Dr. Hasse J, MA (Ko-Promotor I), dan Dr. Ridho Al Hamdi (Ko-Promotor II).